

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Basri (2018: 3) memandang akuntansi sektor publik sebagai serangkaian proses dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, mencatat, hingga menyajikan informasi-informasi tersebut oleh lembaga publik menjadi sebuah laporan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, Majid (2019: 6) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Sementara itu, Hantono *et al.* (2021: 3) mengungkapkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan oleh lembaga publik yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan rangkaian proses akuntansi yang dilakukan oleh entitas publik dalam rangka menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang

membutuhkan untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (Mardiasmo, 2018: 3). Tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai hasil tertentu yang memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan yang berbeda-beda. Di beberapa sisi, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik tersebut disebabkan karena adanya lingkungan yang mempengaruhi.

Berikut merupakan komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi (Mardiasmo, 2018: 3-5).

1. Faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta sektor informal.
2. Faktor politik, yaitu hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, serta kelembagaan.
3. Faktor kultural, yaitu keragaman (suku, ras, agama, bahasa, dan budaya), sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan.

4. Faktor demografi, yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.

Selanjutnya, Hantono *et al.* (2021: 3) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik digunakan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat dengan karakteristik yang berfokus pada dua hal sebagai berikut.

1. Fokus pada sifat lembaga, yaitu fokus pada akuntansi sektor publik ini adalah khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba.
2. Fokus pada tujuan lembaga, yaitu fokus untuk menyediakan informasi pelayanan publik. Pelayanan publik ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2018: 18) mengungkapkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki tujuan sebagai berikut.

1. *Management Control*

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

2. *Accountability*

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya serta memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk

melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2.1.1.4 Perbedaan dan Persamaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta

Akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta berbeda karena perbedaan sifat dan karakteristik suatu entitas (Majid, 2019: 115), perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta

	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Sektor Swasta
Tujuan Entitas	<i>Nonprofit oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, penerbitan obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, dan penjualan aset negara.	Laba ditahan, penjualan aset, utang bank, penerbitan saham, dan penerbitan obligasi.
Pertanggungjawaban	Kepada masyarakat dan parlemen.	Kepada pemegang saham dan kreditor.
Struktur Organisasi	Bersifat birokrasi.	Bersifat fleksibel.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik.	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	<i>Cash accounting.</i>	<i>Accrual accounting.</i>

Sumber: Majid (2019: 115)

Sementara itu, persamaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta adalah sebagai berikut (Yuesti *et al.*, 2020: 4).

1. Bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya.
3. Membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen.
4. Menghasilkan produk yang sama.

5. Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

2.1.1.5 Jenis Akuntansi Sektor Publik

Menurut Defitri *et al.*, (2022: 9), akuntansi sektor publik dibagi ke dalam dua jenis sebagai berikut.

1. Akuntansi Pemerintah

Menyajikan informasi keuangan terkait kegiatan pemerintah yang nantinya akan dilaporkan kepada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota).

2. Akuntansi Sosial

Memuat informasi keuangan terkait kegiatan non-profit oleh entitas sosial seperti partai politik, LSM, yayasan, tempat peribadatan, puskesmas, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya.

2.1.1.6 Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi adalah pedoman atau dasar untuk pembuatan dan pelaporan informasi keuangan entitas publik atau pemerintah dengan tujuan memberikan informasi pada para pengguna laporan keuangan (Hantono *et al.*, 2021: 81). Standar akuntansi keuangan banyak diperlukan dalam bentuk menjaga konsistensi dalam pelaporan keuangan, sehingga terjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi sektor publik.

Menurut Hantono *et al.* (2021: 81), terdapat beberapa kondisi yang harus diperhatikan dalam penetapan standar, yaitu sebagai berikut.

1. Standar memberikan dasar penjelasan yang harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, maupun aktivitas sebuah entitas bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Standar menyampaikan beberapa petunjuk dan dasar aktivitas bagi auditor yang mengharuskan melakukan pengujian secara akurat dan mandiri saat memakai keahlian dan kredibilitasnya ketika memeriksa laporan suatu entitas serta memverifikasi kewajarannya.
3. Standar memberikan informasi mengenai beberapa data yang perlu dilaporkan terkait berbagai variabel yang wajib direkomendasikan dalam aspek perpajakan, peraturan, perencanaan, serta peraturan dan pengembangan kemampuan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan sosial lainnya.

Sementara itu, standar akuntansi sektor publik yang berlaku di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2.1.1.7 Akuntansi Sektor Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menggunakan basis kas untuk pengukuran transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka gunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa pelaksanaan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual paling lambat dalam kurun waktu selama lima tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Pemerintah Pusat RI, 2010). Selanjutnya, untuk penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi.

Di bawah ini gambaran besar mengenai hal-hal yang diatur dan dimuat dalam peraturan tersebut.

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan.

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya adalah basis akrual. Tetapi, dalam menyusun dan melaksanakan anggaran dilakukan berdasarkan pada basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

a. Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

b. Prinsip Realisasi

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran yang dimaksud atau membayar utang.

c. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Menyajikan informasi dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi serta bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi-bagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan sumber posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

1) Periode tahunan: LRA, LP-SAL, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

2) Periode semesteran: LRA, LO, LPE, dan neraca.

3) Periode bulanan: LRA

e. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah. Perubahan metode akuntansi tetap dapat dilakukan dengan syarat metode yang baru diterapkan tersebut mampu memberikan hasil yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode diungkapkan dalam CaLK.

f. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau CaLK.

g. Prinsip Penyajian Nilai Wajar

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

4. Komponen Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA juga menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LP-SAL hanya disajikan oleh bendahara umum daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

c. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

Menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitoris. LAK hanya disusun dan disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP-SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK.

5. Pengakuan Komponen Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana yang akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan dengan menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan, pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima oleh entitas pelaporan.

d. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sementara itu, belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari entitas pelaporan. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan prasyarat

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.2 Pengawasan Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Pemerintah Pusat RI, 2008).

Sedangkan menurut Sururama dan Amalia (2020: 3), pengawasan internal adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Tinangon *et al.* (2021: 3) mendefinisikan pengawasan internal sebagai proses menentukan standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan bila ada perbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal adalah serangkaian proses yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan atau pekerjaan suatu organisasi berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

2.1.2.2 Tujuan Pengawasan Internal

Menurut Sururama dan Amalia (2020: 67), pengawasan internal memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja.
2. Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang serta kebocoran dan pemborosan.
3. Meningkatkan pelayanan.
4. Memperlancar kegiatan.

2.1.2.3 Fungsi Pengawasan Internal

Menurut Sururama dan Amalia (2020: 67-69), pengawasan internal memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan.

Pengawasan internal yang baik dan tepat adalah pengawasan yang mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan. Untuk dapat mencegah hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan internal secara rutin dan tegas.

2. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab.

Adanya pengawasan internal yang dilakukan secara rutin akan mengakibatkan setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dikerjakannya, sehingga tidak akan terjadi tindakan yang saling menyalahkan dalam melaksanakan tugas.

3. Untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis.

Dengan adanya pengawasan internal, diharapkan sedini mungkin bisa mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, sehingga semua bagian yang ada di dalam organisasi akan selalu siap dan berusaha agar tidak terjadi kesalahan pada bagiannya.

4. Untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.

Dengan adanya pengawasan internal, harus dapat diimplementasikan berbagai cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dan kesalahan yang terjadi. Hal tersebut dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlarut-larut yang dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan, Tinangon *et al.* (2021: 3) menyatakan bahwa fungsi pengawasan internal adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kinerja organisasi.
2. Memberikan opini atas kinerja organisasi.
3. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada.

2.1.2.4 Manfaat Pengawasan Internal

Menurut, Sururama dan Amalia (2020: 31), pengawasan internal memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Tersedianya informasi bagi manajemen mengenai situasi nyata organisasi.
2. Diketahuinya faktor-faktor yang mendukung terjadinya operasionalisasi rencana secara efektif dan efisien.

3. Adanya pemahaman tentang faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Dapat melakukan tindakan preventif dengan segera agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

2.1.2.5 Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Berikut gambaran besar mengenai pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1. Unsur Pengawasan Intern
 - a. Perencanaan Pengawasan Intern

APIP menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan pengawasan intern tahunan dengan prioritas kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP. Perencanaan disusun dengan mengedepankan aspek pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berkala, sinergi, dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan tersebut mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, tujuan, metodologi, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan inspektur. Setiap tahapan pelaksanaan pengawasan intern harus dilaksanakan supervisi berjenjang secara periodik dan memadai untuk memastikan tercapainya sasaran. Dalam pelaksanaan pengawasan intern harus mengumpulkan dan menguji bukti yang relevan, kompeten, cukup, material, dan mendukung untuk melihat kesesuaian informasi yang terkandung dalam bukti tersebut dengan suatu kriteria yang mendasarinya. Pelaksanaan pengawasan intern dapat didukung dengan dokumen dalam bentuk kertas kerja yang disimpan secara tertib dan sistematis.

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, terdapat dua jenis kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan penjaminan kualitas, yaitu audit, evaluasi, *review*, dan pemantauan.
 - a) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - b) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

c) *Review* adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

d) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas, yaitu konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

c. Pelaporan Pengawasan Intern

APIP wajib untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis dengan segera setelah berakhirnya masa pelaksanaan pengawasan intern. Laporan hasil pengawasan tersebut harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, ringkas, dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan intern. Laporan hasil pengawasan disusun dan disampaikan oleh APIP kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan wali kota.

d. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern. Untuk mencapai hasil

pengawasan intern yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan intern diwajibkan untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintah. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern adalah kepala SKPD/unit kerja.

e. Dokumentasi Informasi Pengawasan Intern

Dokumentasi dalam pelaksanaan pengawasan intern berbentuk kertas kerja yang akan di-*review* secara berjenjang untuk menjamin kesesuaian program kerja penugasan.

2. Kode Etik dan Standar Pengawasan Intern

Untuk menegakan prinsip-prinsip etika bagi auditor, maka disusun kode etik yang berpedoman kepada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi auditor. Sementara itu, dalam menjaga mutu hasil pengawasan intern, disusun standar pengawasan intern yang berpedoman kepada standar pengawasan yang ditetapkan oleh organisasi profesi auditor.

3. Manajemen Pengawasan Intern

a. Piagam Audit

Piagam audit dibuat dengan tujuan agar *auditee* dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga tugas dan fungsi APIP dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Piagam audit akan di-*review* secara periodik sesuai kebutuhan.

b. Pola Hubungan Kerja Pengawasan Intern

Pelaksanaan pengawasan intern harus mengutamakan komunikasi dan koordinasi yang berdasarkan pada asas transparansi, saling menghargai, dan kebersamaan untuk tercapainya sinergitas dalam pengawasan internal.

c. Pembinaan Pengawasan Intern

Wali kota melakukan pembinaan kepada APIP secara berjenjang, baik secara administratif maupun fungsional. Selain itu, setiap auditor pun wajib untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta kompetensi lainnya melalui pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan.

d. Telaahan Sejawat

Untuk menjaga mutu hasil pengawasan intern, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat yang berpedoman kepada telaahan sejawat yang ditetapkan oleh organisasi profesi auditor.

e. Standar Operasional Prosedur

Sebagai pedoman teknis dan langkah kerja dalam pelaksanaan pengawasan intern, disusun standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan inspektur.

4. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pengawasan intern bersumber dari APBD.

5. Ketentuan Lain

Ketentuan mengenai pengawasan intern yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2015 ini berlaku secara mutatis mutandis untuk pengawasan intern terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.1.3 *Good Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good Governance*

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Mardiasmo, 2018: 23).

Sedangkan, Wijaya *et al.* (2018: 6) memandang *good governance* sebagai suatu tata kelola pemerintah yang lebih baik dari sebelumnya dan diterapkan dalam rangka mewujudkan kesuksesan dalam suatu organisasi, sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang dibuat.

Menurut Riddell yang dikutip oleh Khairudin *et al.* (2021: 13) mendefinisikan *good governance* sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan negara, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara demokratis dan berintegritas dengan mengedepankan kepentingan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip *good governance* menurut United National Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2018: 23-24) terdiri dari sembilan prinsip, yaitu sebagai berikut.

1. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*, yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan.

Sementara itu, KNKG dalam Khairudin *et al.* (2021: 16) mengungkapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut.

1. Demokrasi

Demokrasi mengandung 3 unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.

2. Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, sehingga setiap lembaga negara

dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.

4. Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab.

2.1.3.3 Pilar-Pilar *Good Governance*

Good governance hanya akan terwujud apabila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik, jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut (Majid, 2019: 22-23).

1. Negara/Pemerintah (*Good Government Governance*)
 - a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil.
 - b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.
 - c. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*.
 - d. Menegakkan HAM.
 - e. Melindungi lingkungan hidup.

- f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.
2. Sektor Swasta (*Good Corporate Governance*)
 - a. Menjalankan industri.
 - b. Menciptakan lapangan kerja.
 - c. Menyediakan insentif bagi karyawan.
 - d. Meningkatkan standar hidup masyarakat.
 - e. Memelihara lingkungan hidup.
 - f. Menaati peraturan.
 - g. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.
 3. Masyarakat Madani (*Civil Society*)
 - a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi.
 - b. Mempengaruhi kebijakan publik.
 - c. Sebagai sarana *check and balance* pemerintah.
 - d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah.
 - e. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

2.1.3.4 Tujuan *Good Governance*

Menurut KNKG dalam Khairudin *et al.* (2021: 14), tujuan pelaksanaan *good governance* adalah sebagai berikut.

1. Mendorong efektifitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga non struktural sesuai dengan tugas dan

wewenangannya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi, baik secara regional maupun internasional.

2.1.3.5 Manfaat *Good Governance*

Menurut Pareke dalam Khairudin *et al.* (2021: 15), ada 4 manfaat yang diperoleh dalam penerapan *good governance* sebagai berikut.

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
2. Meningkatkan kepercayaan publik.
3. Menjaga kelangsungan pemerintahan daerah.
4. Dapat mengukur target kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya, KNKG dalam Khairudin *et al.* (2021: 15) mengungkapkan bahwa penerapan *good governance* sangat diyakini dapat memberikan kontribusi yang strategis sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Menciptakan iklim bisnis yang sehat.
3. Meningkatkan kemampuan daya saing.

4. Sangat efektif dalam menghindari penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap.

2.1.4 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diterangkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Priansa (2016: 269) mengungkapkan bahwa kinerja disebut juga dengan *job performance* atau *level of performance* yang merupakan tingkat organisasi dalam menyelesaikan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, Sturisno (2018: 123) memandang kinerja sebagai hasil kerja yang dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa kinerja instansi pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu atau organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang diukur berdasarkan standar kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan.

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

1. Pengertian

Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018: 151).

Beliau juga menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan sebagai pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2. Tujuan

Mardiasmo (2018: 152) mengemukakan bahwa secara umum, pengukuran kinerja organisasi sektor publik memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

3. Manfaat

Manfaat dari pengukuran kinerja organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2018: 153).

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward* dan *punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

4. *Value for Money*

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2018: 160). Kinerja organisasi sektor publik tidak dapat dinilai hanya dari *output* saja, namun harus tetap diimbangi dengan mempertimbangkan melalui *input*, *output*, dan *outcome* secara bersamaan. Bahkan, pada beberapa hal perlu juga ditambahkan pengukuran mengenai distribusi dan cakupan layanan.

Mardiasmo (2018: 160) juga menjelaskan bahwa ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung seperti hal-hal yang bersifat hanya sekedar indikasi-indikasi dari kinerja.

Dalam menentukan indikator kinerja, diperlukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian.
- b. Spesifikasi teknis dan standarisasi.
- c. Kompetensi dan profesionalisme.
- d. Mekanisme ekonomi dan pasar.
- e. Mekanisme sumber daya manusia.

Secara umum indikator dalam *value for money* terbagi ke dalam 3 pokok bahasan yaitu, ekonomi yang membahas mengenai *input*, efisiensi yang membahas mengenai *input* dan *output*, serta efektivitas yang membahas mengenai *output* dan *outcome*.

Pengukuran dalam *value for money* diterangkan oleh Mardiasmo (2018: 167-169) adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan *input* yang dipergunakan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas tidak menyatakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pengukuran *Outcome*

Outcome adalah dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dibandingkan *output* karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan.

2.1.4.3 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, LKIP memuat uraian singkat organisasi, isu strategis, Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), perjanjian kinerja, kerangka pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. LKIP dibuat dalam rangka menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah dari berbagai aspek.

Berikut ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan LKIP Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat dua aspek utama, yaitu keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta keberhasilan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (IKM dan SAKIP).

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Dalam hal ini, dijabarkan mengenai realisasi program dan anggaran yang mendukung sasaran strategis tersebut, sehingga dapat diketahui capaian efisiensi yang telah dilaksanakan. Pada capaian ini pula biasanya dikemukakan mengenai hal-hal yang mendukung tercapainya tingkat sasaran strategis yang berhasil direalisasikan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini ringkasan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah daerah.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anjani dan Hapsari	• Variabel independen:	• Variabel independen:	Penerapan akuntansi sektor	<i>Journal of Economic,</i>

	(2024), SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan akuntansi sektor publik Metode penelitian: Kuantitatif 	<p>Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Tidak ada variabel intervening Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	<p>publik tidak berpengaruh, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>	<p><i>Business and Accounting (COSTING)</i> Vol. 7 No. 4 e-ISSN: 2597-5234</p>
2.	Karlina <i>et al.</i> (2023), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal Variabel dependen: Kinerja instansi pemerintah Terdapat variabel: <i>Good governance</i> Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada variabel intervening Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	<p>Penerapan akuntansi sektor publik dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan, sedangkan pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.</p>	<p>Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol. 1 No. 3 e-ISSN: 2988-6880</p>
3.	Tadjudinsyah dan Fitria (2023), RSUD Dr. Soetomo Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal Variabel dependen: Kinerja instansi pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada variabel intervening Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	<p>Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.</p>	<p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vo. 12 No. 2 e-ISSN: 2461-0585</p>

		Metode penelitian: Kuantitatif			
4.	Sudarto dan Ramli (2024), Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal • Variabel dependen: Kinerja instansi pemerintah daerah • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon Vol. 6 No. 2 e-ISSN: 2747-2779
5.	Yasin (2024), Pemerintahan Desa Puulemo Kec. Baula	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Kualitas laporan realisasi APBD • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis <i>Partial Least Squares</i> (PLS) dan <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) 	Penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan realisasi APBD Puulemo.	Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Riset Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 e-ISSN: 3064-2566
6.	Jatmiko (2020), SKPD di Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengawasan internal • Variabel dependen: Kinerja pemerintah daerah • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Akuntabilitas dan transparansi • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	Pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.	Jurnal Akuntansi Trisakti Vol. 7 No. 2 e-ISSN: 2339-0832
7.	Ayu <i>et al.</i> (2024), Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Transparansi 	Penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan	<i>Journal of Business innovation and Accounting Research</i>

	Provinsi Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> dan pengawasan internal • Variabel dependen: Kinerja instansi pemerintah • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jakarta.	Vol. 1 No. 2 e-ISSN: 3031-6618
8.	Epriliani (2022), Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengawasan intern • Variabel dependen: Kinerja pemerintah daerah • Terdapat variabel: <i>Good governance</i> • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Disiplin kerja • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	Penerapan <i>good governance</i> , pengawasan internal, dan disiplin kerja secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.10 No. 1 e-ISSN: 2721-3048
9.	Oktavianto (2023), OPD di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan • Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	Implementasi akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan berdampak pada keakuratan laporan keuangan dan konsekuensinya untuk meminta pertanggungjawaban entitas pemerintah atas kinerjanya.	Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 6 No. 4 e-ISSN: 2615-0913
10.	Irene <i>et al.</i> (2024), RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat analisis: Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh positif dan 	JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing) Vol. 5 No. 1 e-ISSN: 2723-2522

		<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Kinerja instansi pemerintah daerah • Variabel intervening: <i>Good governance</i> • Metode penelitian: Kuantitatif 		<p>signifikan terhadap <i>good governance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Good governance</i>, penerapan akuntansi sektor publik, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. • <i>Good governance</i> memediasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. 	
11.	Juanda dan Darmayanti (2021), Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi dan pengawasan internal • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Kinerja pegawai pemerintah • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, penerapan akuntansi tidak berpengaruh dan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintah. • Secara simultan, penerapan akuntansi dan pengawasan internal berpengaruh 	Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 5 No. 2 e-ISSN: 2655-5050

				signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah.	
12.	Mubarak <i>et al.</i> (2021), Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Akuntansi sektor publik dan pengawasan internal • Variabel dependen: Kinerja instansi pemerintah daerah • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pengawasan internal berpengaruh dan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. • Secara simultan, pengawasan internal dan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. 	<i>Journal of Accounting and Finance</i> (JACFIN) Vol. 2 No. 1 e-ISSN: 2746-5624
13.	Lintong <i>et al.</i> (2017), Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kotamobagu	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengawasan internal • Variabel dependen: Kinerja pemerintah daerah • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	Implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.	<i>Jurnal Accountability</i> Vol. 6 No. 1 e-ISSN: 2338-3917
14.	Novitasari dan Prabowo (2020), SKPD di Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengawasan internal • Variabel dependen: Kinerja pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengelolaan keuangan daerah • Tidak ada variabel intervening 	Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja	Diponegoro <i>Journal of Accounting</i> Vol. 9 No. 2 e-ISSN: 2337-3806

		<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	pemerintah daerah.	
15.	Wiyana <i>et al.</i> (2023), Instansi Pemerintah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik • Metode penelitian: Kuantitatif deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Transparansi laporan keuangan • Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	Penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.	Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo Vol. 9 No. 2 e-ISSN: 2723-1070
16.	Rahmani (2023), Dinas Pemerintah Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Kinerja dinas pemerintah • Terdapat variabel: <i>Good government governance</i> • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Sistem pengendalian intern • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	Pengawasan internal berpengaruh signifikan, sedangkan <i>good government governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Pemerintah Kota Bandung.	<i>Journal of Economics, Finance, and Social Science Review</i> Vol. 1 No. 1
17.	Peilouw <i>et al.</i> (2023), BPKAD Kabupaten Kupang	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Kualitas laporan keuangan • Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	Penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak) Vol. 5 No. 1 e-ISSN: 2356-4297
18.	Nada dan Khoiriawati	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: 	<i>Good governance</i> dan	<i>Fair Value: Jurnal Ilmiah</i>

	(2022), Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar	Kinerja aparatur pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel: <i>Good governance</i> • Metode penelitian: Kuantitatif 	Pengendalian internal <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	pengendalian internal secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pada 11 desa di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.	Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 10 e-ISSN: 2622-2205
19.	Hidayat <i>et al.</i> (2021), OPD Kabupaten Kampar Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel: <i>Good governance</i> • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Kompetensi dan pengendalian akuntansi • Variabel dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah • Tidak ada variabel intervening • Alat analisis: Analisis regresi linier berganda 	<i>Good governance</i> dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Kampar.	Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi Vol. 1 e-ISSN: 2798-7477
20.	Zai <i>et al.</i> (2022), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengawasan internal • Metode penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Kinerja pegawai • Tidak ada variabel intervening 	Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Utara.	Jurnal EMBA Vol. 10 No. 4 e-ISSN: 2303-1174
21.	Bernia <i>et al.</i> (2017), Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengawasan internal • Variabel intervening: <i>Good governance</i> • Variabel dependen: Kinerja ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Reformasi birokrasi • Alat analisis: Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan internal berpengaruh tetapi tidak signifikan, sedangkan reformasi birokrasi berpengaruh signifikan 	EKOBISMAN: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Vol. 2 No. 1 e-ISSN: 2597-9302

		<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: Kuantitatif 		<p>terhadap <i>good governance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan internal berpengaruh tetapi tidak signifikan, sedangkan reformasi birokrasi dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN. 	
22.	Yusniyar <i>et al.</i> (2016), SKPA di Pemerintah Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel intervening: <i>Good governance</i> • Metode penelitian: Kuantitatif • Alat analisis: Analisis jalur 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan sistem akuntansi pemerintah dan pengendalian intern • Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem akuntansi pemerintah dan pengendalian intern berpengaruh terhadap <i>good governance</i>. • Sistem akuntansi pemerintah, pengendalian intern, dan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 	Jurnal Magister Akuntansi Vol. 5 No. 2 e-ISSN: 2302-0164
23.	Purwanti (2022), Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik • Terdapat variabel: <i>Good governance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada variabel intervening • Metode penelitian: Kualitatif deskriptif 	<i>The application of local government accounting is closely related to four governance arrangements, namely fairness, transparency, accountability, and responsibility.</i>	<i>Journal of Governance</i> Vol. 7 No. 2 e-ISSN: 2598-6465
24.	Ginting <i>et al.</i> (2023), PT PLN UP3 Binjai	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Penerapan akuntansi sektor publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Pencegahan fraud 	<i>The application of public sector accounting can prevent fraud in the public sector in the digital era</i>	ProBisnis: Jurnal Manajemen Vol. 14 No. 6 e-ISSN: 2086-7654

		<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada variabel intervening• Metode penelitian: Kualitatif deskriptif	<i>if implemented by considering factors that affect fraud.</i>		
25.	Gyamerah <i>et al.</i> (2024), Bank Bursa Efek Ghana	<ul style="list-style-type: none">• Variabel dependen: Kinerja perusahaan• Metode penelitian: Kuantitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none">• Variabel independen: Sistem pengendalian internal• Variabel moderating: Teknologi Informasi• Alat analisis: Analisis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	<i>The results emphasize the importance of Information Technology and control activities within ICS, evidenced by their positive correlation with corporate performance.</i>	Scientific African Vol. 26

Azzahra Nurkhofi Suprpto (2025) 213403516
Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan *Good Governance* sebagai Variabel Intervening
(Survei pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya)

Sumber: Diolah oleh Penulis

2.2 Kerangka Pemikiran

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Majid, 2019: 6). Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan *management control* dan *accountability*. Informasi tersebut diperlukan untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya tersebut kepada publik, sehingga terciptanya tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *good governance*.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Defitri *et al.* (2022: 10), bahwa akuntansi sektor publik menjadi prioritas utama dalam mewujudkan *good governance*. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Mardiasmo, 2018: 23). *Good governance* memiliki prinsip-prinsip, yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability*, dan *strategic vision*. Akuntansi sektor publik mampu untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut (Defitri *et al.*, 2022: 10).

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Yusniyar *et al.* (2016) yang mengungkapkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi sektor publik yang dilakukan, maka semakin baik juga tingkat prinsip-prinsip *good governance* yang dibangun oleh instansi pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian Irene *et al.* (2024) mendukung hal tersebut dengan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap *good governance*.

Faktor berikut yang juga penting dalam mewujudkan *good governance* adalah pengawasan internal. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Pemerintah Pusat RI, 2008). Pengawasan internal berfungsi untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan, meningkatkan rasa tanggung jawab, menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dalam keadaan yang dinamis, serta memperbaiki berbagai kesalahan dan penyimpangan yang terjadi. Fungsi-fungsi tersebut yang kemudian dapat mengantarkan pemerintah untuk menciptakan *good governance*.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Irene *et al.* (2024) bahwa pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* karena pengawasan internal mampu membantu pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kelemahan, kesalahan, dan risiko kecurangan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh hasil penelitian Yusniyar *et al.* (2016) yang menyimpulkan bahwa semakin baik pengawasan internal yang dilakukan pada setiap instansi pemerintah daerah, maka semakin baik pula prinsip-prinsip *good governance* yang dibangun. Pada hasil penelitian Bernia *et al.* (2017) pun diungkapkan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap *good governance*.

Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk menyediakan informasi mengenai pelayanan publik guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik tersebut yang selanjutnya dapat mempresentasikan bahwa suatu instansi pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik. Kinerja instansi pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun

tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Pemerintah Pusat RI, 2007). Untuk mencapai pelayanan publik yang optimal, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang tepat karena kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, akuntansi sektor publik mampu menyediakan informasi yang andal dan relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Penelitian Tadjudinsyah dan Fitria (2023) serta Karlina *et al.* (2023) membuktikan pernyataan tersebut dengan mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Sudarto dan Ramli (2024) serta Ayu *et al.* (2024) bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti mengindikasikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan publik dengan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan terutama mengenai penerapan akuntansi sektor publik dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengawasan internal juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah. Tujuan utama pengawasan internal adalah memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan. Pengawasan internal yang baik akan meminimalisir adanya penyimpangan yang mungkin terjadi dan mendorong terwujudnya

akuntabilitas atas pelaksanaan program atau kegiatan (Jatmiko, 2020). Dengan demikian, pengawasan internal yang efektif akan mendorong pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah yang optimal.

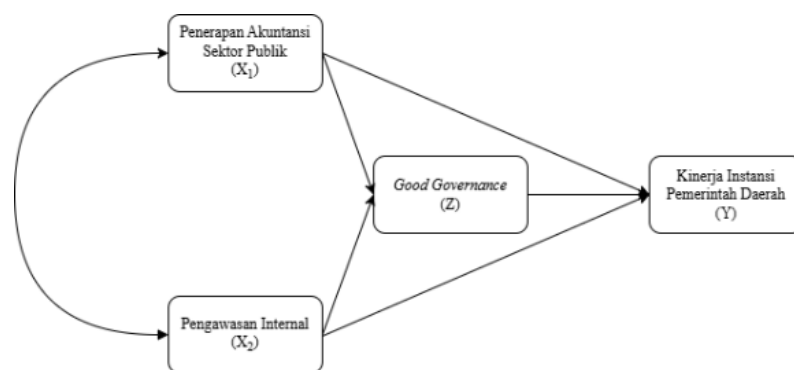
Penelitian yang dilakukan oleh Lintong *et al.* (2017) telah membuktikan hal tersebut dengan menunjukkan hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Prabowo (2020) serta Mubarak *et al.* (2021). Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang baik berperan penting dalam mewujudkan kinerja instansi pemerintah daerah yang berkualitas.

Untuk menciptakan kinerja instansi pemerintah daerah yang berkualitas, *good governance* juga sangat diperlukan (Rahmani, 2023). Diterapkannya *good governance* pada suatu instansi pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kinerja instansi pemerintah itu sendiri karena dengan diterapkannya *good governance* dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, menghindari penyimpangan, serta sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap. Rahmani (2023) juga menyatakan bahwa *good governance* digunakan untuk menjaga keseimbangan antara capaian tujuan pemerintah dan tujuan masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan penelitian Epriliani (2022) yang menyatakan bahwa dengan adanya penerapan *good governance*, maka keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tata kelola pemerintah dan pelayanan publik akan

mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan. Penerapan *good governance* akan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah karena dengan penerapan *good governance* akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat mencerminkan peningkatan dalam capaian kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian Nada dan Khoiriawati (2022) mendukung hal tersebut dengan menunjukkan hasil bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Selanjutnya, hal serupa juga dijumpai pada penelitian yang dilakukan oleh Karlina *et al.* (2023).

Berdasarkan uraian hubungan antar variabel di atas, berikut merupakan kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_1 : Penerapan Akuntansi Sektor Publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Governance*.

- H₂ : Pengawasan Internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Governance*.
- H₃ : Penerapan Akuntansi Sektor Publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- H₄ : Pengawasan Internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- H₅ : *Good Governance* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- H₆ : Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*.
- H₇ : Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, dan *Good Governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.